

PERANAN UNCTAD DAN OPEC: KERJASAMA ATAU KONFRONTASI?

N. ARSJAD

PENDAHULUAN

Di bulan Mei tercatat dua peristiwa penting yang tentunya akan mempunyai pengaruh besar atas perkembangan ekonomi dunia. Satu, adalah pertemuan negara-negara pengekspor minyak (OPEC) yang diadakan di Bali dan yang lain adalah konperensi PBB yang ke-IV tentang perdagangan dan pembangunan (UNCTAD) di Nairobi, Kenya, Afrika. Pertemuan yang disebut terakhir ini dihadiri oleh hampir semua bangsa-bangsa anggota PBB, baik dari kelompok negara-negara Barat, kelompok negara-negara berkembang, maupun kelompok negara-negara komunis. Sebelum kelompok negara-negara berkembang datang ke konperensi UNCTAD ke-IV di Nairobi itu, kelompok itu terlebih dahulu telah mengadakan pertemuan tingkat Menteri (dikenal dengan nama sidang Kelompok 77) di Manila. Pertemuan Manila (26 Januari 1976 - 6 Pebruari 1976) merupakan persiapan terakhir negara-negara berkembang untuk menentukan posisi bersama dalam menghadapi negara-negara maju di Nairobi. Sidang kelompok 77 wilayah Asia dalam UNCTAD, sebelum bertemu dengan kelompok 77 wilayah Afrika dan Amerika Latin di Manila, telah pula mengadakan sidang di Jakarta bulan Januari yang lalu.

Nampaknya, secara lahiriah, antara dua pertemuan besar itu tidak ada kaitannya sama sekali, dan membahas pokok persoalan yang berbeda. Akan tetapi, sebenarnya, dua konperensi itu mempunyai satu persamaan yang mendasar yaitu bahwa di dalam dua konperensi tersebut bangsa-bangsa di dunia sedang berusaha mencari bentuk kerjasama yang saling menguntungkan guna mewujudkan kemakmuran dunia yang adil dan merata.

Terutama bagi negara-negara berkembang yang biasa juga disebut negara-negara "Dunia Ketiga", usaha-usaha ke arah terciptanya suatu kehidupan yang lebih baik, harmonis dan bekerjasama, masih harus diperjuangkan terus. Memang, ini bukanlah satu hal yang gampang, sebab walaupun tidak ada satupun di antara bangsa-bangsa yang tidak setuju akan "kerjasama", namun adalah sukar untuk mewujudkannya. Perbedaan-perbedaan sikap, politik, pandangan, kepentingan, pengalaman dan filosofi masing-masing negara itulah yang menjadi penghambat utama untuk terwujudnya suatu kerjasama internasional yang serasi.

OPEC DAN UNCTAD: SEJARAH DAN IDENYA

Negara-negara pengekspor minyak yang sekarang bergabung dalam OPEC adalah Arab Saudi, Kuwait, Iran, Persatuan Negara-negara Emirat Arab, Qatar, Irak, Libya, Aljazair, Nigeria, Venezuela, Equador dan Indonesia. Negara-negara tersebut di atas merupakan negara-negara anggota OPEC yang berstatus penuh, mempunyai hak memilih, hak untuk memveto dan berkewajiban untuk mentaati kebijakan-kebijakan seperti yang digariskan OPEC. Ada pula negara anggota yang berstatus "associate member" yaitu Gabon yang mempunyai hak memilih tetapi tidak mempunyai hak untuk memveto. Di samping itu ada negara-negara anggota yang berstatus "peninjau" (observer) yaitu Peru, Trinidad, dan Tobago. Status peninjau ini harus diperbaharui kembali dalam setiap pertemuan OPEC berikutnya. Sementara itu Meksiko yang sudah mulai mengekspor minyaknya telah mengajukan keinginannya untuk menjadi negara-negara anggota OPEC.

Kerjasama OPEC ini belum dapat disebut "kartel", sebab kedaulatan masih dipunyai negara-negara anggota, akan tetapi ada semacam kewajiban moril untuk mentaati keputusan-keputusan konperensi sebagai kekuasaan tertinggi di dalam organisasi. Organisasi negara-negara pengekspor minyak ini didirikan pada tahun 1960 (kemudian negara-negara Arab pengekspor minyak juga mendirikan OAPEC pada tahun

1968) dengan tujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan, serta melindungi dan menjamin kepentingan negara-negara anggota pada umumnya.

Di dalam OPEC terdapat Dewan Gubernur yang bertugas langsung mengatur organisasi, melaksanakan resolusi-resolusi yang diajukan dalam konperensi OPEC, dan menyusun anggaran tahunan. Gubernur-gubernur ini terdiri atas wakil-wakil negara-negara anggota, diangkat untuk dua tahun lamanya. Pertemuan pleno Dewan Gubernur diadakan minimal dua tahun sekali. Ketua Dewan Gubernur pada tahun 1974 adalah Dr. Abdullah Al-Sayyab dari Irak. Di samping Dewan Gubernur, terdapat pula satu Sekretariat Jenderal yang mengkoordinir kegiatan sehari-hari bidang administrasi, ekonomi dan keuangan, informasi, teknik, statistik dan kesekretariatan. Jabatan Sekretaris Jenderal untuk periode 1975-1977 dipegang oleh Meschach Feyide dari Nigeria.

Lahirnya OPEC ini juga turut memperkuat "bargaining position" masing-masing negara penghasil minyak terhadap perusahaan-perusahaan raksasa multinasional di bidang perminyakan yang sebelumnya sangat menentukan kebijakan penyediaan dan penjualan minyak internasional. Perusahaan-perusahaan raksasa multinasional minyak yang paling besar dewasa ini adalah sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yaitu: (1) Exxon (sebelumnya disebut Standard Oil Company, New Jersey), (2) Mobil (sebelumnya disebut Socony Vacuum Oil Company), (3) Gulf (Gulf Oil Corporation), (4) Texaco (sebelumnya disebut The Texas Company), (5) Socal (Standard Oil Company of California), (6) B.P. (British Petroleum Company, Ltd.) dan (7) Shell (Royal Dutch Petroleum Company and Shell Transport and Trading). Ketujuh perusahaan raksasa ini terkenal dengan julukan "The Seven Sisters".

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) adalah lembaga permanen PBB sebagai organ dari Majelis Umum PBB. UNCTAD didirikan dengan resolusi bulan Desember 1964, bukan merupakan lembaga khusus PBB (UN - Specialized Agency) seperti IMF, World Bank, FAO, UNESCO,

ILO, dan sebagainya, melainkan suatu forum pertemuan negara-negara anggota PBB yang kegiatannya lewat konperensi. Supaya lembaga UNCTAD menjadi efektif, dibentuklah Sekretariat Jenderal yang berkedudukan di Jenewa. Sekretaris Jenderal yang pertama adalah Dr. Raul Prebisch (dari Argentina) seorang genius yang disegani karena ketajaman pikirannya dan banyak jasanya kepada UNCTAD. Tesisnya yang terkenal: "The Theory of Peripheral Economy" (teori tentang perekonomian daerah "pinggiran"), walaupun kerap dikritik, namun telah banyak membantu mereka yang ingin mengetahui posisi negara-negara berkembang (countries of the "periphery"). Teori Dr. Prebisch ini juga telah banyak sumbangannya kepada perkembangan teori ekonomi pembangunan. Sekretaris Jenderal UNCTAD berikutnya adalah Dr. Perez Guerrero, dan Sekretaris Jenderal yang sekarang adalah Gamani Corea dari Sri Lanka.

Walaupun bangsa-bangsa yang bertemu di forum UNCTAD bukan semata-mata dari negara-negara berkembang, namun UNCTAD didirikan untuk kepentingan negara-negara berkembang, dan memang, terbentuknya UNCTAD adalah hasil perjuangan negara-negara berkembang di dalam waktu yang cukup lama. UNCTAD adalah suatu forum yang anggotanya sangat luas, karena semua negara-negara anggota PBB ikut serta dalam forum UNCTAD, tidak seperti halnya dengan lembaga IMF atau World Bank di mana tidak seluruh negara-negara anggota PBB menjadi anggota kedua badan tersebut. Menurut catatan, tahun 1975 terdapat 147 negara-negara menjadi anggota UNCTAD.

UNCTAD didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan secara bertahap sejumlah kebijakan yang terkoordinasikan dan yang harus disetujui negara-negara anggota, guna menunjang lancarnya akselerasi pembangunan negara-negara berkembang. Rumusan tujuan yang seperti itu mengandung segi-segi yang luas yaitu meliputi segala spektrum kebijakan negara-negara maju maupun kebijakan negara-negara berkembang itu sendiri, yang dapat mempengaruhi perdagangan dan pembayaran luar negeri serta pembangunan ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya.

Usaha-usaha untuk merintis pembentukan lembaga UNCTAD telah lama dilakukan. Konperensi PBB tentang perdagangan dan kesempatan kerja (UN Conference on Trade and Employment) yang diadakan di Havana (21 Nopember 1947 - 24 Maret 1948), dapat dipandang sebagai usaha pendahuluan ke arah

terbentuknya UNCTAD. Semula, konperensi Havana itu akan membentuk "Organisasi Perdagangan Internasional" (International Trade Organization = ITO). Akan tetapi nampaknya tidak ada titik pertemuan pendapat antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, maka ITO tidak pernah terwujud dan sebagai gantinya lahirlah GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947.

Walaupun ITO tidak pernah terwujud, namun cita-cita untuk membentuk suatu organisasi atau forum tempat bangsa-bangsa dapat bertemu untuk membicarakan kerjasama internasional dalam segala seginya: perdagangan, pembayaran, kredit, keuangan, perkapalan, asuransi, transport, dan lain sebagainya, selalu diperjuangkan. Pada akhirnya sebagai hasil perjuangan yang panjang dan lama, lahirlah UNCTAD pada tahun 1964 dan telah mengadakan sidangnya (istilahnya session) yang pertama di Jenewa, pada tanggal 23 Maret - 16 Juni 1964, sidangnya yang kedua (1 Pebruari - 29 Maret 1968) diadakan di New Delhi, sedangkan yang ketiga (13 April - 21 Mei 1972) diadakan di Santiago. Sidang yang paling akhir ini, yang keempat, diadakan di Nairobi (5 - 31 Mei 1976).

Supaya kegiatan UNCTAD tidak terputus, maka kegiatan di antara dua konperensi (semacam pleno) dilakukan oleh "Trade and Development Board", bersama-sama dengan beberapa Komite yang dibentuk menurut kebutuhan setiap tahunnya. Dewan Perdagangan dan Pembangunan beserta Komite-komitennya itu sering juga mengadakan sidang-sidangnya tersendiri yang dihadiri pula oleh utusan-utusan negara-negara anggota UNCTAD.

KEKUATAN BARU DUNIA KETIGA

OPEC adalah lambang kebangkitan Dunia Ketiga yang sekarang mulai menyadari bahwa sebenarnya dirinya mempunyai kekuatan di dalam pergaulan kehidupan dunia. Di tahun-tahun akhir-akhir ini dapat dilihat bahwa meskipun negara-negara pengekspor minyak terbesar, seperti Arab Saudi, Kuwait dan Iran belum mungkin menjadi negara "super power", namun posisi negara-negara tersebut harus diperhitungkan dan pendapat mereka harus didengar.

Karena situasi perkembangannya, antara lain peristiwa perang Arab-Israel, aksi-aksi negara-negara Arab khususnya, negara-negara pengeks-
por minyak lainnya pada umumnya, telah berhasil menentukan "bargaining
position" terhadap negara-negara maju. Ini merupakan suatu pelajaran
dan pengalaman bahwa ternyata negara-negara Dunia Ketiga memiliki po-
tensi kekuatan dalam posisi bersaing pada perdagangan internasional. Le-
tak kekuatan OPEC ialah pada kemampuan mereka dalam mengekspor minyak
dan memonopoli pasaran internasional. Sebagai kekuatan baru, negara-ne-
gara pengekspor minyak yang tergabung ke dalam OPEC ternyata sanggup
mengubah pola ekonomi dunia yang berlaku pada tahun-tahun 1960-an. Ke-
lompok negara-negara pengekspor minyak itu dengan kekayaan minyak mere-
ka yang melimpah itu telah dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi negara-
negara industri kaya.

Untuk jangka waktu puluhan tahun yang mendatang, diperkirakan mi-
nyak bumi masih menempati kedudukan dominan sebagai sumber energi utama.
Alternatif sumber energi lainnya masih belum mampu bersaing dengan mi-
nyak bumi baik karena: (i) biaya eksploitasinya mahal (sumber tenaga
atom dan sumber minyak yang berasal dari sejenis batu-"shale oil"), (ii)
penggunaannya yang tidak praktis (batubara), maupun (iii) tidak cukup-
nya persediaan (LNG dan sumber tenaga air). Dengan demikian kebutuhan
dunia akan sumber energi sebagian besar masih dilayani oleh minyak bumi.

Hampir dapat dipastikan bahwa permintaan negara-negara industri
akan minyak bumi, akan lebih meningkat lagi di waktu-waktu mendatang,
yaitu apabila negara-negara industri kaya dapat mengatasi resesi indus-
tri dalam negeri mereka. Bila pembatasan konsumsi pemakaian minyak bumi
sukar dilakukan, maka semakin tinggi lagi ketergantungan negara-negara
seperti Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang, akan minyak bumi.

Kalangan politisi maupun para ahli negara-negara Barat sangat
mengecam sikap negara-negara Arab pengekspor minyak yang melakukan po-
litik embargo minyak di dalam rangka ikhtiar mereka memenangkan perang.
Hal itu terjadi di akhir tahun 1973. Walaupun pada tahun 1974 negara-
negara Arab telah mengendorkan embargo minyak mereka, telah melonggar-
kan kembali penyediaan minyak mereka untuk negara-negara industri kaya,

namun harga minyak telah dinaikkan yaitu dari US\$ 2,29 per barrel menjadi US\$ 11,65 per barrel. Kenaikan harga minyak ini dipandang sebagai penyebab utama timbulnya inflasi yang telah meluas menjadi inflasi dunia.

Apa yang dikatakan kalangan politisi Barat itu tidak seluruhnya benar. Inflasi sudah berjangkit jauh sebelum harga minyak dinaikkan. Menurut Sheikh Ahmad Zaki Yamani, Menteri Perminyakan dan Bahan Tambang Arab Saudi, kenaikan harga minyak hanya menyumbang di sekitar 1% sampai 2% kepada pola inflasi yang terjadi sekarang¹. Sebenarnya, negara-negara pengekspor minyak merasakan bahwa harga sebelumnya dari minyak yang mereka ekspor terlalu rendah, sedangkan harga barang-barang industri adalah mahal. Negara-negara industri kaya dituduh telah mendasarkan pola kemakmuran masyarakatnya pada minyak murah negara-negara berkembang. Krisis moneter dunia (tahun 1970 dan 1971) telah mengubah harga-harga, sedangkan harga minyak pada waktu itu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan harga-harga yang berlaku. Jadi penetapan harga minyak yang sekarang berlaku dipandang sudah wajar.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa negara-negara yang tergabung ke dalam OPEC itu mempunyai "power" yang ruang lingkupnya bersifat global. Mereka mampu untuk "memaksa" negara-negara kaya mengubah kebijakan luar negerinya. Bahkan tidak mustahil OPEC sebagai satu kekuatan yang bersatu itu nantinya dapat "menggiring" negara-negara maju ke arah tuntutan-tuntutan yang adil dari Dunia Ketiga baik dalam bidang perdagangan, sumber-sumber bahan mentah, investasi internasional, kredit maupun bantuan luar negeri.

Kekuatan yang dimiliki negara-negara pengekspor minyak yang telah membentuk semacam "kartel" itu akan merangsang negara-negara berkembang lainnya yang juga menghasilkan bahan-bahan mentah dan bahan baku lainnya (yang tidak kalah peranannya dibanding dengan peranan minyak),

¹Newsweek, 7 Oktober 1974

seperti kayu, karet alam, nikel, bauksit, timah, wolfram, dan kobalt, untuk membentuk satu ikatan yang bersatu dan berkekuatan. Dengan demikian martabat Dunia Ketiga akan lebih tinggi lagi di forum internasional.

TANTANGAN YANG DIHADAPI OPEC

OPEC sebagai satu kekuatan baru dihadapkan oleh tiga tantangan di dalam hubungannya dengan penggalangan pergaulan dunia yang harmonis dan stabil.

Pertama, adalah apakah ia dapat turut memelihara kestabilan pertumbuhan kehidupan dunia baik di dalam arti politis maupun di dalam arti ekonomis. Hal ini berarti OPEC harus dapat menghindari sikap yang bersifat konfrontatif di dalam menghadapi negara-negara "utara". Politik konfrontasi bisa menimbulkan akibat bahwa negara-negara maju akan menjalankan politik membatasi impor, politik diskriminasi dan proteksi yang luas. Dalam hubungannya dengan hal tersebut ada suatu pendapat yang ekstrim yaitu bahwa negara-negara industri kaya dianjurkan bersikap keras untuk memaksa negara-negara pengekspor minyak untuk melakukan transaksi sesuai dengan syarat yang ditentukan sepihak. Bahkan ada pula gagasan "gila" yaitu bahwa apabila negara-negara Arab tetap menjalankan politik kaku sehingga akan mengakibatkan depresi ekonomi, maka dianjurkan sebaiknya negara-negara industri maju mengadakan intervensi militer.

Dilihat dari sudut hal-hal tersebut di atas, sikap negara-negara pengekspor minyak yang bertemu di Bali bulan Mei ini adalah sudah jelas. Keputusan sidang OPEC di Bali yang antara lain menunda kebijaksanaan menaikkan harga minyak mungkin dapat dipandang sebagai adanya keinginan untuk menciptakan iklim yang baik dalam kehidupan dunia. Dilihat dari sudut antar anggota negara-negara yang tergabung ke dalam OPEC itu sendiri, keputusan OPEC di Bali merupakan bukti adanya solidaritas yang tinggi, walaupun mungkin banyak di antara negara-negara anggota, untuk kepentingan ekonomi dalam negeri mereka, memerlukan ditingkatkannya penerimaan devisa dari minyak.

Tantangan yang kedua adalah bahwa negara-negara yang tergabung dalam OPEC harus mempunyai kesadaran moral untuk membantu negara-negara berkembang lainnya yang memerlukan bantuan, khususnya negara-negara yang sekarang populer dengan nama, negara-negara "MSA" (most-seriously affected countries). Negara-negara MSA adalah negara-negara yang secara serius mudah terkena pengaruh kesulitan-kesulitan ekonomi yang melanda dunia pada akhir-akhir ini, termasuk adanya krisis energi internasional. Negara-negara semacam itu adalah negara-negara yang "ketahanan" ekonominya sangat lemah. Negara-negara semacam itu biasanya disebut negara-negara yang sangat "miskin" yang pendapatan per kapita mereka di bawah US\$ 200 setahun, tidak memiliki kekayaan minyak bumi dan tidak banyak memiliki sumber-sumber bahan mentah lainnya. Bahkan mereka masih banyak mengimpor bahan makanan yang harganya mahal sekali. Negara-negara kelompok ini bukan saja dijumpai di wilayah Asia, tetapi juga tersebar di wilayah Afrika dan Amerika Latin, terutama di Afrika Sahel dan Asia bagian selatan. Pada tahun 1974, OPEC (kecuali Indonesia dan Equador) telah menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan, dan komitmen bantuan OPEC secara bilateral adalah sebesar US\$ 5,9 milyar sedangkan secara multilateral mencapai sebesar US\$ 1,6 milyar. Kurang lebih 40% dari bantuan bilateral ditujukan kepada negara-negara MSA, sedangkan 60% lagi diberikan kepada negara-negara Arab lainnya yang memerlukan bantuan. Penerima bantuan terbesar adalah Mesir dan Syria.

Tantangan yang ketiga adalah bahwa OPEC tentunya harus benar-benar dapat menciptakan kemakmuran yang adil dan merata bagi bangsa mereka sendiri. Dalam hubungannya dengan hal ini adalah menarik bila diikuti pendapat Raja Arab Saudi, almarhum Raja Faizal¹. Almarhum Raja Faizal pernah mengatakan bahwa dengan bertambahnya petro-dollar yang dimiliki negara-negara Arab bukan berarti negara-negara Arab sudah merasa bahagia. Seperti diketahui, sebenarnya, keadaan negara-negara Arab, khususnya negara Arab Saudi, masih belum maju. Negara Arab Saudi ingin sekali melihat perekonomiannya terbangun, banyak didirikan industri-industri, jalan-jalan dan prasarana lainnya, termasuk kesehatan dan pendidikan.

¹ Newsweek, 10 September 1974

KEDUDUKAN NEGARA-NEGARA DUNIA KETIGA DI FORUM UNCTAD

Sejak selesainya Perang Dunia II ada semacam perasaan "tidak puas" dari kelompok negara-negara berkembang terhadap perkembangan ekonomi internasional. Perasaan tidak puas di dalam manifestasinya mengambil bentuk dalam sikap tidak senang pada negara-negara industri kaya yang sebenarnya dalam banyak hal dapat menentukan terwujudnya suatu kemakmuran dunia yang adil dan merata. Di dalam perkembangannya dapat dilihat bahwa seakan-akan telah terjadi krisis hubungan antara "Utara" dan "Selatan" yang semakin meningkat. Bahkan di suatu waktu pernah menjurus ke arah "konfrontasi" yang keras.

Pengaruh negara-negara maju terhadap perkembangan ekonomi negara-negara berkembang bukan hanya lewat perdagangan, investasi dan bantuan internasional saja, tetapi sebenarnya juga lewat kegiatan-kegiatan di bidang politik, militer, moneter internasional, kebijakan kurs (exchange rate), ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Di dalam pergaulan dan kerjasama internasional, segala kegiatan negara-negara maju yang mempunyai "impact" (sentuhan pengaruh) terhadap negara-negara berkembang, seharusnya diusahakan sedemikian rupa, sehingga turut mempercepat pembangunan negara-negara Dunia Ketiga.

Di dalam perkembangannya, sistem dan struktur ekonomi internasional belum menguntungkan buat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Negara-negara kaya makin bertambah kaya, negara-negara miskin makin bertambah "anak". Bagian negara-negara berkembang di dalam perdagangan dunia semakin menurun, dan kondisi pertukaran (terms of trade) negara-negara berkembang semakin merugi. Politik proteksi negara-negara maju semakin menekan, terutama bagi barang-barang hasil industri (misalnya tekstil) negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun 1960-an pendapatan per kapita negara-negara kaya naik di sekitar US\$ 650, sedang pendapatan per kapita negara-negara berkembang hanya naik di sekitar US\$ 40.

Investasi-investasi swasta negara-negara kaya, lebih banyak dilakukan di wilayah antar negara mereka sendiri daripada di negara-negara berkembang. Bantuan keuangan negara-negara maju makin jauh dari 1% GNP mereka. Bantuan tersebut lebih banyak didasarkan kerelaan negara-negara kaya daripada didasarkan kepada kebutuhan negara-negara berkembang. Pemindahan sumber-sumber daya ke negara-negara berkembang hanyalah merupakan pemindahan teknologi, sistem pendidikan, bantuan dana dan lain sebagainya, yang tidak berdasarkan suatu pola yang disepakati bersama, ~~hingga hasilnya kurang~~ memadai bagi negara-negara penerima.

Lembaga-lembaga yang mendorong kelancaran perdagangan internasional, seperti GATT, ternyata lebih berorientasi kepada kebutuhan negara-negara industri kaya. Pemotongan-pemotongan tarif dalam rangka persetujuan GATT tidak membawa efek yang berarti atas perdagangan negara-negara berkembang. Faktor yang lebih banyak menghalangi perluasan perdagangan negara-negara berkembang sebenarnya bukanlah masalah tarif akan tetapi penyebabnya lebih banyak terletak pada kurang kuatnya permintaan akan komoditi-komoditi negara-negara berkembang.

Walaupun terdapat tanda-tanda bahwa negara-negara kaya pada tahun-tahun belakangan ini akan lebih memperhatikan lagi keinginan dan kepentingan negara-negara berkembang, namun nampaknya kemauan politik negara-negara maju masih jauh dari yang diharapkan. Perundingan perdagangan multilateral yang diselenggarakan GATT di Tokyo bulan September 1974, telah melahirkan "Deklarasi Tokyo" yang isinya suatu janji negara-negara maju untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang. Peristiwa ini merupakan suatu kemajuan yang menggembirakan bagi kepentingan negara-negara berkembang dalam menuntut hak mereka yang wajar dan adil.

Hingga diselenggarakannya konferensi UNCTAD ke-IV di Nairobi bulan Mei 1976, ternyata janji-janji negara-negara kaya tersebut belum seluruhnya terwujud dan memuaskan. Usaha-usaha mencari penyelesaian dan kerjasama internasional di dalam perdagangan dan pembangunan hampir mengalami jalan buntu. Namun demikian, setelah melalui serangkaian perundingan-perundingan yang panjang, lama dan melelahkan (tiga minggu lamanya), pada

akhirnya melalui perundingan informil tingkat menteri terbatas, konperensi UNCTAD ke-IV tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan konsensus.

Ada dua masalah pokok yang diperdebatkan dalam konperensi UNCTAD tersebut, yaitu: (i) masalah komoditi dan (ii) masalah hutang. Masalah komoditi merupakan masalah yang paling pokok dan sulit yang dihadapi konperensi UNCTAD. Selama 20 tahun, masalah komoditi belum pernah dapat dipecahkan secara memuaskan dalam bentuk suatu konsepsi yang menyeluruh, di mana selama ini selalu terdapat perbedaan-perbedaan pandangan yang sangat besar antara pandangan negara-negara berkembang dan pandangan negara-negara maju. Masalah lain yang pemecahannya hampir menemui jalan buntu dalam konperensi, ialah masalah keuangan dan moneter, terutama masalah hutang.

Seperti diketahui, negara-negara berkembang yang tergabung ke dalam kelompok 77 mendasarkan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan mereka atas dasar "Deklarasi Manila". Di bidang komoditi, kelompok 77 mengajukan konsep "program komoditi yang terpadu" (integrated programme for commodities) serta terutama konsep "dana bersama" (common fund) sebagai unsur utamanya yang menunjang program tersebut. Program komoditi terpadu (beserta konsep dana bersamanya) adalah suatu konsep yang ingin memajukan perdagangan internasional yang adil dan wajar.

Deklarasi Manila menghendaki dibentuknya program komoditi terpadu dengan tujuan menjamin stabilitas harga, menjamin negara eksportir maupun negara konsumen bahan mentah dari negara-negara berkembang. Stabilitas tersebut dikaitkan dengan suatu dana bersama (diinginkan sebesar US\$ 1 milyar) yang dibentuk dari sumbangan negara-negara berkembang maupun dari negara-negara maju, guna membiayai stock cadangan tersebut. Program ini mencakup 17 komoditi yang sering mengalami fluktuasi harga yaitu kopi, coklat, teh, gula, kapas, karet, sisal, yute, tembaga, timah, gandum, beras, pisang, daging, wol, bauksit dan biji besi.

Tuntutan dasar kelompok 77 di bidang hutang antara lain mengenai peringanan-peringanan yang drastis terhadap beban hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju termasuk usul penghapusan atau

moratorium bagi hutang resmi, konsolidasi hutang-hutang komersial, dan lain-lain. Kelompok 77 juga menuntut suatu "Konferensi Internasional" antara negara-negara pemberi kredit dan negara-negara penerima kredit, supaya disusun patokan-patokan umum bagi penyelesaian masalah hutang, serta diadakan tindakan-tindakan tertentu guna merombak sistem moneter.

Walaupun pada akhirnya tuntutan-tuntutan kelompok 77 tidak disetujui sepenuhnya, namun bentuk kompromi sebagaimana hasil-hasil konferensi UNCTAD tersebut merupakan kemajuan besar sekali bagi negara-negara berkembang.

Dari pengalaman perjuangan negara-negara berkembang selama ini dapat ditarik pelajaran bahwa unsur persatuan merupakan satu kekuatan besar dalam menentukan sikap untuk menghadapi negara-negara maju. Sikap kelompok 77 pada sidang UNCTAD ke-IV di Nairobi, politik embargo minyak oleh OPEC yang dilakukan di tahun 1973 dan 1974, sikap-sikap positif negara-negara berkembang, yang pada umumnya tidak terpecah, di dalam pertemuan-pertemuan negara-negara non-blok (antara lain turut melahirkan konsepsi Orde Ekonomi Internasional Baru), adalah bukti adanya persatuan dan solidaritas yang tinggi yang sekarang suara mereka didengar dan pandangan mereka diperhatikan.

PENUTUP

Janji-janji negara-negara kaya untuk turut mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara Dunia Ketiga belum memuaskan. Hasilnya di sana-sini masih mengecewakan. Walaupun demikian, belakangan ini terdapat suatu perkembangan yang menggembirakan.

Pengalaman memberi pelajaran bahwa perbaikan nasib suatu negara harus datang dari usaha sendiri. Kerjasama internasional yang menguntungkan harus diperjuangkan. Kesatuan sikap antar negara Dunia Ketiga, solidaritas yang tinggi sangat menentukan dalam perjuangan.

Dilihat baik dari sudut sosial, politik maupun ekonomi, dewasa ini dunia telah banyak mengalami perubahan-perubahan kualitatif. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia dewasa ini merupakan suatu petunjuk dimulainya cara baru. Munculnya OPEC sebagai satu kekuatan baru, peranan Kelompok 77 dalam UNCTAD, termasuk suatu peristiwa besar. Kini mulai timbul kepercayaan dan harga diri Dunia Ketiga bahwa sebenarnya mereka mempunyai kekuatan riil untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka di forum internasional.

Konperensi OPEC di Bali dan UNCTAD di Nairobi bulan Mei adalah suatu kemenangan negara-negara berkembang, kemenangan di dalam arti bahwa mereka telah dapat melakukan introspeksi diri, di mana mereka telah dapat menciptakan persatuan dan kekompakan yang mengagumkan, serta solidaritas yang meyakinkan di dalam menghadapi negara-negara maju.

Kejadian-kejadian dunia dalam dasawarsa tahun-tahun 1970-an ini adalah suatu tantangan buat OPEC dan Kelompok 77 di dalam memainkan peranan mereka untuk turut menggalang hubungan ekonomi internasional yang harus menggugah hati nurani seluruh bangsa di dunia untuk menyusun sistem dan struktur ekonomi dunia yang lebih baik dan manusiawi.**